



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MANADO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON**

Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168 Telepon (0911) 361045
Ambon Kode Pos 97231

www.ptun-ambon.go.id, ptun.ambon@gmail.com

Ambon, 28 Maret 2024

Nomor : 9/PAN.PTUN.W8-TUN4/H.01.01/III/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tri Wulan ke I (satu)

Kepada Yang Mulia :
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Manado
Di -

Manado

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tri Wulan Ke I (satu) Bulan Januari s/d Maret 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dilaksanakan terhadap 10 orang Responden. Demikian Laporan kami untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITERA

PIETER P. RESIMANUK, S.Sos.S.H.,M.H.
NIP. 19700818 199403 1 003

TEMBUSAN : (bersama lampiran)

Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Yth : Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Yang Mulia Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan TUN MARI di Jakarta
3. Yth : Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Up. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara MARI di Jakarta
4. Yth ; Sekretaris Ditjen Badilmiltun Mahkamah Agung RI di- Jakarta
5. Yth : Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara TUN MARI di Jakarta
6. Yth : Panitera Muda Tata Usaha Negara MARI di Jakarta
7. A r s i p

HALAMAN PENGESAHAN

**LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
TRIWULAN I TAHUN 2024
PERIODE JANUARI – MARET**

Ambon, 28 Maret 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon



**ANNA L. TEWERNUSSA, S.H., M.H.
NIP. 19721211 199803 2 002**

LAPORAN

SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON



**TRIWULAN I TAHUN 2024
PERIODE BULAN JANUARI – MARET**

HALAMAN PENGESAHAN

**LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON
TRIWULAN I TAHUN 2024
PERIODE JANUARI – MARET**

Ambon, 28 Maret 2024

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon 

**ANNA L. TE/WERNUSSA, S.H., M.H.
NIP. 19721211 199803 2 002**

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja.....	2
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
BAB II.....	3
METODOLOGI.....	3
2.1. Metode Penelitian.....	3
2.2. Populasi Dan Sampel.....	3
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis.....	3
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control.....	4
2.5. Teknik Analisis Data.....	4
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	5
BAB III.....	7
INDEKS PERSEPSI KORUPSI.....	7
3.1. Profil responden.....	7
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	17
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	18
BAB IV.....	19
PENUTUP.....	19
4.1. Kesimpulan.....	19
4.2. Rekomendasi.....	19

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2013 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup memadai, yang saat ini sedang dipersiapkan untuk menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusidan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3 Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015- 2019.

1.4 Rencana Kerja

Persiapan

Sebelum melaksanakan Survei Indeks Persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.
- Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam Interval waktu per 3 (tiga) bulan (empat kali dalam satu taun)

BAB II METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang di isi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 10 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Ketua Tim Survei (Hakim Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum). Ketua tim akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 0 - 4. Dimana nilai 0 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring I angka absolut agar diketahui peningkatan I penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

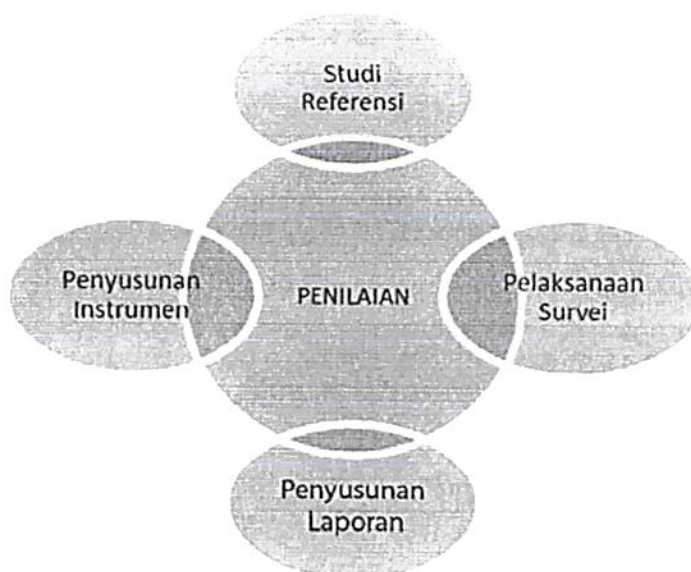
Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 0 – 4, yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi korupsi antara 0 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk Survei Indeks Persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1
Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No.	Ruang Lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi Persen (%)	Mutu	Kinerja
1	0,0 – 1,0	0,0 – 25,0	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,1 – 2,0	25,1 – 50,0	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,1 – 3,0	50,1 – 75,0	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,1 – 4,0	75,1 – 100,0	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Profil responden

Tingkat Jenis kelamin responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang Jenis kelamin, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mayoritas memiliki Jenis Kelamin Laki - laki.

Tabel 4.
Jenis Kelamin Responden

JENIS KELAMIN	JUMLAH	JUMLAH DALAM PERSEN (%)
LAKI – LAKI	7	70
PEREMPUAN	3	30
TIDAK MENGISI	0	0
TOTAL RESPONDEN	10	100.00

Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang Tingkat Pendidikan , pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mayoritas memiliki Tingkat pendidikan Sarjana (S1).

Label 5.
Tingkat Pendidikan Responden

PENDIDIKAN TERAKHIR		
JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	JUMLAH DALAM PERSEN (%)
SD	0	-
SMP	0	-
SMA/K	5	50.00
SARJANA (S1)	5	50.00
PASCASARJANA (S2)	0	-
DOKTOR (S3)	0	-
TIDAK MENGISI	0	-
TOTAL RESPONDEN	10	100.00

Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 60% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon adalah mahasiswa, 20 mencantumkan Pekerjaan Lain-lain, PNS 20%.

Tabel 6.
Jenis Pekerjaan Responden

PEKERJAAN UTAMA		
JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	JUMLAH DALAM PERSEN (%)
PNS	2	20.00
TNI/POLRI	0	-
PEGAWAI BUMN	0	-
PEGAWAI SWASTA	0	-
WIRAUSAHA	0	-
PETANI/NELAYAN	0	-
PELAJAR/MAHASISWA	6	60.00
LAIN-LAIN	2	20.00
TIDAK MENGISI	0	-
TOTAL RESPON	10	100.00

Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa 10% berada pada rentang usia 20-29 tahun, 40% pada rentang usia 30-39 tahun, sementara 50% berada pada rentang usia 50 tahun keatas.

Tabel 7
Usia Responden

RENTANG USIA	JUMLAH	JUMLAH DALAM PERSEN (%)
<19	0	-
20-29	7	70.00
30-39	3	30.00
40-49	0	-
50<	0	-
TIDAK MENGISI	0	-
TOTAL RESPON	10	100.00

Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 3, 20

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon bersih dari korupsi.

Tabel 8.

Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN (%)	TOTAL NILAI
1	4	7	70.00	28
2	3	0	-	0
3	2	1	10,00	2
4	1	2	20.00	2
TOTAL		10	100.00	32
NRR		3. 20		
KATEGORI		(BERSIH DARI KORUPSI)		

Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 3. 20.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon bersih dari korupsi.

Tabel 9.

Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN (%)	TOTAL NILAI
1	4	7	70.00	28
2	3	0	-	0
3	2	1	10.00	2
4	1	2	20.00	2
TOTAL		10	100.00	32
NRR		3. 20		
KATEGORI		(BERSIH DARI KORUPSI)		

Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 3,50

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon bersih dari korupsi.

Tabel 10.

Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN (%)	TOTAL NILAI
1	4	8	100.00	32
2	3	0	-	0
3	2	1	10.00	2
4	1	1	10.00	1
TOTAL		10	100.00	35
NRR		3,50		
KATEGORI		(BERSIH DARI KORUPSI)		

Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 3,2

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon bersih dari korupsi.

Tabel. 11
Transaksi Biaya

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN (%)	TOTAL NILAI
1	4	7	70.00	28
2	3	0	-	0
3	2	1	10.00	2
4	1	2	20.00	2
TOTAL		10	100.00	32
NRR		3.2		
KATEGORI		(BERSIH DARI KORUPSI)		

Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 3,2

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon bersih dari korupsi.

Tabel 12.
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN (%)	TOTAL NILAI
1	4	7	70.00	28
2	3	0	-	0
3	2	1	10.00	2
4	1	2	20.00	2
TOTAL		10	100.00	32
NRR		3.2		
KATEGORI		(BERSIH DARI KORUPSI)		

Indikator Hadiah

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,0

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon bersih dari korupsi.

Tabel 13.
Indeks pada Indikator Hadiah

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN (%)	TOTAL NILAI
1	4	10	100.00	40
2	3	0	-	0
3	2	0	-	0
4	1	0	-	0
TOTAL		10	100.00	40
NRR		4.0		
KATEGORI		(BERSIH DARI KORUPSI)		

Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 2,9

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon cukup bersih dari korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada indikator Transparansi Biaya

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN (%)	TOTAL NILAI
1	4	6	60.00	24
2	3	0	-	0
3	2	1	10.00	2
4	1	3	30.00	3
TOTAL		10	100.00	29
NRR		2.9		
KATEGORI		(CUKUP BERSIH DARI KORUPSI)		

Indikator Percaloan

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,00

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon bersih dari korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada Indikator Percaloan

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN (%)	TOTAL NILAI
1	4	10	100.00	40
2	3	0	-	0
3	2	0	-	0
4	1	0	-	0
TOTAL		10	100.00	40
NRR		4.00		
KATEGORI		(BERSIH DARI KORUPSI)		

Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,00

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon bersih dari korupsi.

Tabel 16.

Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN (%)	TOTAL NILAI
1	4	10	100.00	40
2	3	0	-	0
3	2	0	-	0
4	1	0	-	0
TOTAL		10	100.00	40
NRR		4.00		
KATEGORI		(BERSIH DARI KORUPSI)		

Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 0 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4.00

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon bersih dari korupsi.

Tabel 17.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

NO	NILAI INDIKATOR	JUMLAH	PERSEN (%)	TOTAL NILAI
1	4	10	100.00	40
2	3	0	-	0
3	2	0	-	0
4	1	0	-	0
TOTAL		10	100.00	40
NRR		4.00		
KATEGORI		(BERSIH DARI KORUPSI)		

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebesar 3,16.

Tabel 18.

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

PARAMETER	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
JUMLAH PER RL	32	32	35	32	32	40	29	40	40	40
NRR PER RL	3.2	3.2	3.5	3.2	2.5	4.0	2.9	4.00	4.00	4.00
ANGKA MAKSIMAL (RANGE 1-4)	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
KONVERSI NILAI KE DALAM PERSEN (%)	80	80	87.5	80	80	100	72.5	100	100	100
TOTAL PERTIMBANG DALAM PERSEN (%)	880									
TOTAL NRR TERTIMBANG DALAM PERSEN (%)	88.0									
TOTAL NRR SURVEI	35.2									
NRR SURVEI	3.52									
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)	3.52									

Label 20.
Ringkas Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

KODE	RUANG LINGKUP	NILAI	KATEGORI
P8	MANIPULASI PERATURAN	3.20	(BERSIH DARI KORUPSI)
P9	PENYALAHGUNAAN JABATAN	3.2	(BERSIH DARI KORUPSI)
P10	MENJUAL PENGARUH	3.50	(BERSIH DARI KORUPSI)
P11	TRANSAKSI BIAYA	3.2	(BERSIH DARI KORUPSI)
P12	BIAYA TAMBAHAN	3.2	(BERSIH DARI KORUPSI)
P13	HADIAH	4.00	(BERSIH DARI KORUPSI)
P14	TRANSPARANSI BIAYA	2.90	(CUKUP BERSIH DARI KORUPSI)
P15	PER CALON	4.00	(BERSIH DARI KORUPSI)
P16	PERBUATAN CURANG	4.00	(BERSIH DARI KORUPSI)
P17	TRANSAKSI RAHASIA	4.00	(BERSIH DARI KORUPSI)
INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)		3.52	
BERSIH DARI KORUPSI			

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menunjukkan indeks nilai 3,52 yang berarti bahwa satker masuk dalam katagori Bersih dari Korupsi.

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Triwulan I Periode Januari hingga Maret 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,52 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Prestasi ini harus terus ditingkatkan atau paling tidak tetap dipertahankan. Perbaikan di segala aspek, khususnya pembinaan SOM harus terus dilakukan, demi mewujudkan Visi Mahkamah Agung yaitu.

"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung"